



BAB VI

PENUTUP

Perencanaan dan kebijakan pembangunan parwisata dan komunikasinya di Kabupaten Bengkalis secara strategis dibuat oleh pemerintah daerah, yang bersinergi dengan kebijakan dan ketentuan pemerintah Provinsi Riau dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya diberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah Bengkalis, namun dalam kebijakan taktis ini pemerintah baik pusat hingga daerah masih belum mampu menggerakkan kegiatan parwisata masyarakat. Kegiatan parwisata dan komunikasinya masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan belum banyak mendapatkan penanganan secara maksimal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi belum menjadi pendukung untuk kebijakan pembangunan parwisata di kabupaten ini.

Langkah-langkah yang sudah dibuat dalam mengembangkan komunikasi parwisata dalam pembangunan objek wisata dan pembangunan masyarakat belum berkoordinasi dengan secara intensif. Langkah dan program komunikasi parwisata yang dilaksanakan belum mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif. Hal ini bisa terlihat dari analisis masalah dan khalayak yang belum tepat, pemilihan pesan dan media komunikasi yang digunakan belum dimaksimalkan. Selain itu manajemen komunikasi program parwisata dan evaluasinya belum banyak mendapatkan perhatian serius. Ini dapat terbukti dari pembangunan objek wisata seperti pantai Rupat dan pantai Selat Baru belum dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kabupaten hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pusat untuk memajukan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan sarana jalan seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bersama agar dapat memudahkan akses pembangunan destinasi parwisata di daerah ini. Pembangunan parwisata hendaknya



berorientasi pada pembangunan masyarakat agar memiliki sadarwisata akan petensi daerahnya. Evaluasi kegiatan komunikasi parwisata semestinya dilakukan secara rutin tidak hanya dalam internal dinas pemerintah, namun dilakukan pada setiap komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk komponen komunikainya. Pembangunan komunikasi parwisata semestinya ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan jalan harus menjadi pembangunan utama untuk menjadikan destinasi wisata berubah sesuai tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.